LAPORAN TRIWULAN-1

TA. 2024

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Monitoring Triwulan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring triwulan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan Teknis dan Dukungan Manajemen lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Bogor, 5 April 2024
Kepala Balai Besar Pengujian Standar
Instrumen Pascapanen Pertanian

Dr. Asmarhansyah, S.P., M.Sc.
NIP 197102241998031002

DAFTAR ISI

I	**PENDAHULUAN.....**	**4**
	1.1. Tujuan	5
	1.2. Sasaran	6
II	**AKUNTABILITAS KINERJA .....**	**7**
	2.1. Capaian kinerja	7
	2.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya	8
III	**PERKEMBANGAN KEGIATAN PELAKSANAAN TEKNIS .....**	**9**
	3.1. Standardisasi Produk	9
	3.2. Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian	17
IV	**PERKEMBANGAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN .....**	**18**
	4.1. Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian ...	18
	4.2. Layanan Manajemen Kinerja Internal	23
	4.3. Laporan Aplikasi Monev Online	27
	4.4. Laporan Keuangan	32
	4.5. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya	33
V	**PENUTUP .....**	**34**
	5.1. Kesimpulan	34
	5.2. Saran	35

BAB I
PENDAHULUAN

Balai Besar Pengujian Standarisasi Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen Pertanian) merupakan salah satu Unit Kerja dari BSIP (Badan Standarisasi Instrumen Pertanian), sesuai dengan PERMENTAN 13/2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis lingkup BSIP memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian, dengan Fungsi:a) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; b) Pelaksanaan analisis, pengujian, dan tindakan korektif pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; c) Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi, dan penilaian kesesuaian standar instrumen pascapanen pertanian; d) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standar instrumen pascapanen pertanian; e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen pascapanen pertanian; f) Pelaksanaan urusan tatausaha dan Rumahtangga BBPSI Pascapanen Pertanian. Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, pada tahun 2024 BBPSI Pascapanen memiliki beberapa kegiatan strategis mendukung program nilai tambah dan daya saing industri, yaitu:

1) Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, terdiri dari:
   a. Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian dengan target output 4 standar, mencakup:1) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (Revisi SNI Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian); 2) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Penanganan Pascapanen Bawang Merah untuk Konsumsi);

      3) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Susut padi); 4) Analisis Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng); 5) Persiapan Lembaga Sertifikasi Produk, Jasa, Proses (LSPro); 6) Pengelolaan Komisi Teknis SNI dan CODEX; dan 7) Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian.
   b. Sosialisasi dan Diseminasi, mencakup:1) Penyebarluasan Hasil Standarisasi Instrumen Pascapanen Pertanian; 2) Inkubasi bisnis
   c. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan target output 21 unit, mencakup: Laboratorium Pascapanen Pertanian Terstandar (Peningkatan Kapasitas Laboratorium).

2) Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian, terdiri dari:

a. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan target output 1 layanan, mencakup:

1) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

3) Dukungan Manajemen Fasilitasi Standarisasi Instrumen Pertanian, terdiri dari:

a. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan target output 4 layanan, mencakup:

1) Layanan BMN (Pelaksanaan Pengelolaan BMN, Pengelolaan Barang Milik Negara); 2) Layanan Hubungan Masyarakat (Pendampingan Dukungan Penas); 3) Layanan Umum (Layanan Kerumahtanggaan dan Umum: Manajemen Tata Usaha dan Kelembagaan Internal dan Layanan Informasi Publik, Layanan Pengelolaan PNBP: Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium); 4) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan; Operasional dan Pemeliharaan Kantor: Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, dan Pemeliharaan Kantor; dan Pembayaran Terkait Operasional Kantor).

b. Layanan Manajemen SDM Internal dengan target output 88 orang, mencakup: Pengelolaan Manajemen Kepegawaian (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian).

c. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan target output 3 layanan, mencakup: 1) Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Penyusunan Rencana Program dan Anggaran: Perencanaan Program dan Anggaran, Koordinasi Institusional); 2) Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi: Pelaksanaan Monev, SPI Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi); Layanan Manajemen Keuangan (Pengelolaan Keuangan: Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan, dan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran).

1.1 Tujuan

BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki visi: "Menjadi unit pelaksana teknis yang akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam standardisasi instrumen pascapanen mewujudkan pertanian maju, mandiri, modern". Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki misi: melaksanakan kegiatan standardisasi instrumen pascapanen pertanian mendukung program peningkatan nilai tambah dan daya saing pertanian.

1.2 Sasaran

Dalam mewujudkan visi misinya tersebut, BBPSI Pascapanen Pertanian memiliki sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian kinerja, yaitu:

1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, target tahun ini 4 Rancangan.
2) Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 82 (Nilai)
3) Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 85 (Nilai).

II. AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian TA. 2024, terdapat 3 IKSK (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan) di BBPSI Pascapanen Pertanian yang mendukung pencapaian IKSP (Indikator Kinerja Sasaran Program) BSIP. Berdasarkan Renaksi yang telah disusun di lingkup BSIP, BSIP memiliki sasaran program pertama (SP1) berupa Meningkatnya daya saing komoditas pertanian, dengan indikator kinerja sasaran program (IKSP): Persentase penerapan standar instrumen pertanian, terdiri dari: a) Data SNI yang sudah diterapkan oleh pengguna, b) Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan RSNI di BSIP. Pada SP1 ini, sesuai PK BBPSI Pascapanen Pertanian yang memiliki sasaran kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, target tahun ini 4 Rancangan, maka BBPSI Pascapanen Pertanian hanya berkontribusi pada IKSP kedua, yaitu Data SNI yang ditetapkan oleh BSN dari hasil penyusunan RSNI di BSIP.

BBPSI Pascapanen Pertanian juga berkontribusi pada capaian IKSP3 BSIP, yang memiliki SP3 berupa 'Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima' dengan indikator kinerja sasaran kegiatan di BSIP adalah Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Adapun capaian keberhasilan indikator tersebut sampai dengan bulan Maret 2024 adalah sebagai berikut: a) Persiapan: koordinasi dengan pihak terkait dalam hal persiapan pengumpulan eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi BSIP; b) Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi BSIP sebesar 25%; c) Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi BSIP sebesar 25%, belum dilaksanakan; c) Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi BSIP sebesar 30%,; dan d) Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi BSIP sebesar 50%, juga belum terlaksana.

Sasaran Kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian yang mendukung SP3 BSIP: Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai

Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 82.

Sasaran Kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian yang mendukung SP4 BSIP: Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 85 (Nilai).

2.2 Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan capaian kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian diantaranya:

- Adanya pemblokiran anggaran
- Pembahasan RSNI masih terhambat karena masih adanya pemblokiran anggaran

Adapun beberapa upaya pemecahan permasalahan diatas diantaranya:

- Pemacuan serapan anggaran dan percepatan pelaksanaan kegiatan.
- Diadakan rapat intensif dan Penguatan tim untuk berkoordinasi dengan komtek secara lebih intens.
- Mempercepat kegiatan secara internal, serta kegiatan dilaksanakan mengikuti agenda BSIP.

III. PERKEMBANGAN KEGIATAN PELAKSANAAN TEKNIS

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp31.276.000,00 (2,61%) dengan capaian fisik sebesar 20,50%. Berikut adalah capaian kinerja dari kegiatan teknis di BBPSI Pascapanen Pertanian.

3.1 Standarisasi Produk

a. Penyusunan Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp6.431.000,00 (0,80%) dan realisasi fisik sekitar 24%, dengan perkembangan persub kegiatan sebagai berikut:

i) RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng, realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp5.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 15%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan Rapat internal tim, penyusunan proposal, SOP Penanganan Pasca Panen Daun Rajang Kering Talas Beneng yang telah disusun oleh BSIP Banten akan digunakan sebagai acuan penyusunan RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng. Pada waktu sebelumnya juga telah dilakukan FGD dengan BSIP banten untuk menjaring informasi dan kondisi eksiting komoditas daun talas beneng kering;
- Kunjungan lapang ke Unni Talas Beneng di Serang Banten pada tanggal 4 Maret 2024, Kegiatan dilakukan untuk mengamati proses produksi daun rajangan yang akan digunakan sebagai dasar acuan penyusunan RSNI daun rajangan Talas Beneng berasal dari sejumlah sumber referensi dan kajian di lapangan. Bentuk RSNI yang akan disusun merupakan RSNI proses yang masuk pada Ruang lingkup Komtek 65-22 Pascapanen.

Gambar 1. Daun rajangan talas beneng

- Diskusi dan koordinasi dengan Balai Penerapan Standar Instumen Banten (BSIP Banten) untuk penyusunan RSNI Daun Rajangan kering Talas beneng
- BBPSI Pascapanen Pertanian telah Menyusun draf RSNI tersebut mengacu pada SOP yang telah disusun tim BSIP Banten dan hasil kunjungan lang ke Unni Talas Beneng. Diskusi dilakukan secara offline dan online pada tanggal 27 Maret 2024.Draft RSNI ini akan dibahas lebih lanjut pada tanggal 24 April 2024
- SOP Penanganan Pasca Panen Daun Rajang Kering Talas Beneng yang telah disusun oleh BSIP Banten akan digunakan sebagai acuan penyusunan RSNI Penanganan Proses Pascapanen Daun Rajang Kering Talas Beneng. Pada waktu sebelumnya juga telah dilakukan FGD dengan BSIP Banten untuk menjaring informasi dan kondisi eksiting komoditas daun talas beneng kering.

Gambar 2. Rapat internal tim

ii) RSNI Penanganan Pascapanen Bawang Merah untuk Konsumsi,realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan 31 Maret 2024 Rp6.000.000,00 (20%) dan realisasi fisik sekitar 30%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Draft RSNI, Penyusunan draft RSNI dilaksanakan melalui koordinasi dan diskusi yang diikuti oleh seluruh anggota tim
- Verifikasi lapang terkait transportasi dan distribusi bawang merah

Verifikasi kegiatan transportasi dan distribusi bawang merah dilaksanakan di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta meliputi kegiatan pengangkutan (transportasi), penanganan bawang merah di pasar, dan keragaan bawang merah.

- Penyusunan draft RSNI dilaksanakan melalui koordinasi dan diskusi yang diikuti oleh seluruh anggota Tim.

Gambar 3. Verifikasi lapang transportasi dan distribusi bawang merah

iii) RSNI Metode Pengukuran Susut Pascapanen Padi, realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan 31 Maret 2024 masih 10% dan realisasi fisik sekitar 16%, dengan perkembangan kegiatan yaitu Koordinasi dengan Dinas Pertanian Karawang dan BBPSI Mekanisasi Pertanian

Gambar 4. Koordinasi dengan instansi terkait

iv) Revisi SNI Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian, realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp2.988.000,00 (10%) dan realisasi fisik sekitar 35%, dengan perkembangan kegiatan yaitu telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Balingtan pada tanggal 21 Februari 2024 dengan menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya adalah bahwa Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian akan fokus di Komtek 65-24 dengan output 2 RSNI, namun tetap memprioritaskan untuk penyelesaian output RSNI 1 Revisi SNI BMR, serta Penyusunan Draft Revisi SNI BMR Pestisida

Gambar 5. Rapat koordinasi dengan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

v) Penguatan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pascapanen Pertanianrealisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp23.553.500,- (9,92%) dan realisasi fisik sekitar 35%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi internal persiapan pelaksanaan asesmen akreditasi

  Kegiatan koordinasi internal dalam rangka persiapan pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan pada tgl 5 sd 7 Februari 2024. Kegiatan dilakukan untuk melakukan inventarisasi pelaksaaan kegiatan akreditasi dan pembagian tugas mock up audit yang telah diberikan oleh tim asesor.

- Asesmen akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

  Asesmen akreditasi LPH dilakukan oleh tim dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan anggota tim asesor tiga orang, yang terdiri atas dua asesor teknis dan satu asesor syariah. Asesor yang melakukan asesmen akreditasi LPH antara lain Amar Bramantiyo (Asesor Teknis – Lead asessor); Dias Indrasti (Asesor Teknis); Muhammad Djamaluddin (Asesor Syariah); Fitriah Setia Rini dan Ari Setianingsih (Sekretariat BPJPH). Asesmen yang dilaksanakan ini mengacu kepada SNI dan ISO 17065, selain itu juga mengacu pada peraturan badan jaminan produk halal no. 1 tahun 2023.

Gambar 6. Asesmen akreditasi LPH

- Mengikuti pelatihan Juru sembelih halal

  Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) telah diikuti pada tanggal 19 dan 21 Februari 2024 yang diselenggarakan oleh Halal Science Center IPB University. Pelatihan dilakukan secara hybrid, daring dan luring. Pelaksanaan pelatihan pada tanggal 19 Februari (online) dan 21 Februari 2024 (offline). Pada pelatihan secara luring dilakukan di Halal Science Center IPB University dan dilanjutkan praktek di RPH Tapos Depok.

Gambar 7. Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)

- Memperbaiki form ketidaksesuaian proses asesmen LPH

  Perbaikan dari hasil temuan ketidaksesuaian telah selesai dilakukan dan telah dilakukan pengiriman dokumen pendukungnya sesuai dengan hasil temuan ketidak sesuaian. Terdapat 14 temuan ketidaksesuaian (minor) dan 7 ketidaksesuaian (observasi).

- Melakukan diskusi dan koordinasi system integrasi dengan tim IT BPJPH dan BSIP

Untuk menjadi LPH yang terakreditasi, salah satu persyaratannya adalah mengintegrasikan sistem Informasi Halal (Sihalal) BPJPH dengan website yang dibangun oleh LPH BBPSI Pascapanen Pertanian. Hasil kegiatan diskusi dan koordinasi serta konsultasi terkait integrasi sistem registrasi halal LPH ke dalam Sistem Informasi Halal (SIHALAL) BPJPH dengan Bapak Nurhanudin selaku Ketua Tim Layanan Sistem Informasi BPJPH dan Bapak Rizki selaku Tim IT BPJPH yaitu sebagai berikut :

a) LPH wajib memiliki sistem aplikasi untuk diintegrasikan dengan aplikasi sihalal
b) Proses integrasi dapat dilakukan secara paralel dengan assessment
c) Aplikasi LPH bisa juga diletakkan dalam website BBPSI Pascapanen Pertanian
d) Aplikasi LPH khusus dioperasikan untuk admin LPH
e) BPJPH memberikan akses melalui script endpoint berbasis API dan JSON, tanpa menyediakan CMS, sehingga CMS harus dibuat sendiri oleh BBPSI Pascapanen Pertanian. Contoh implementasi dilihat pada website berikut : https://test.halal.go.id/ dan https://www.lph-ipb.id/.
f) Aplikasi LPH diwajibkan agar kedepannya LPH dapat mengembangkan secara mandiri data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan LPH

Gambar 8. Koordinasi sistem integrasi dengan tim IT BPJPH

- Melakukan Pelatihan alur sertifikai halal

  Pelatihan Alur sertifikasi halal untuk para personel LPH BBPSI Pascapanen Pertanian dilakukan pada tangal 19 Februari 2024 dengan nara sumber Bapak Dading Haryo dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku Analis Standar Halal. Proses sertifikasi halal sudah tidak lagi dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) namun dikelola oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Apabila terdapat produk yang sudah mendeklarasikan halal namun tidak memiliki sertifikasi halal, maka produk tersebut belum bisa dinyatakan sebagai produk halal. Kewajiban untuk sertifikasi halal berlaku WAJIB bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan. Penyesuaian regulasi dalam layanan sertifikasi halal berdasarkan UU No. 6 tahun 2023.

- Penjajakan calon klien pelaku usaha sertifikasi mutu beras

  Kegiatan penjajakan calon klien usaha sertifikasi mutu beras dicalon klien untuk sertifikasi mutu beras sedang dilakukan dengan lokasi pelaku usaha penggilingan padi di daerah pamijahan dan lampung. Kegiatan pemeriksaan awal di LSPro BBPSI Pascapanen akan menggunakan auditor dari luar sebagai lead auditor dengan didampingi auditor magang dari BBPSI Pascapanen. Hal yang sama akan dilakukan metode yang untuk RL lainnya sesuai dengan RL dari LSPro yang sudah ditetapkan. Kedepannya proses penjajakan akan ditiadakan dan diganti dengan promosi dengan media sosial agar klien yang mendatangi LSPo untuk sertifikasi sesuai RL

- Melakukan diskkusi dan koordinasi sistem integrasi dengan BPJPH

  Status akreditasi LPH saat ini sedang menunggu hasil penilaian asesmen dari BPJPH (Hari ini dilakukan rapat hasil asessmen). LPH baru bisa beroperasi jika sudah terakreditasi, status akreditasi baru diberikan oleh BPJPH jika layanan di BBPSI Pascapanen Pertanian sudah terintegrasi dengan aplikasi SiHalal BPJPH. Persyaratan yang belum terpenuhi adalah melakukan integrasi layanan pemeriksa halal dari LPH BBPSI Pascapanen Pertanian dengan aplikasi SiHalal BPJPH.

- Koordinasi internal kegiatan LSPro

  Koordinasi internal kegiatan LSPro dilakukan dalam rangka merencanakan kegiatan tahap berikutnya pada Tahun 2024 yang akan dilaksanakan terkait operasionalisasi LSPro dan LPH. Untuk lingkup produk yang akan diambil oleh LSPRO pascapanen antara lain Beras, Gula, Serealia dan Pertanian organik.

vi) Pengelolaan Sekretariat Mirror Committee Codexrealisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp1.291.500,- (1,29%) dan realisasi fisik sekitar 16%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dan Biologi terkait Pemasukan & Pengeluaran

Gambar 9. Koordinasi batas maksimum cemaran kimia dan biologi

- Koordinasi Komtek dengan Badan Standardisasi Nasional

Gambar 10. Koordinasi dengan BSN

- Pembahasan Posisi Indonesia untuk Sidang CCCF ke 17
- Sinkronisasi Data Residu Codex dengan PSP

3.2 Perumusan PNPS Pascapanen Pertanian

Realisasi anggaran kegiatan ini sampai dengan 31 Maret 2024 masih Rp00 (0%) dan realisasi fisik sekitar 16%, dengan perkembangan Kegiatan PNPS untuk tahun 2025 baru dilaksanakan mencari informasi topik calon PNPS 2024 yang tidak diajukan proses RSNI tahun 2024 dari tim kegiatan sebelumnya (Penjab Sandro Pangidoan, STP, MSi beserta anggota tim). Diperoleh informasi bahwa terdapat calon PNPS 2024 dengan topik bunga krisan potong dan infestasi kutu pada beras.

IV. PERKEMBANGAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

4.1. Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi InstrumenPertanian

i) Layanan Pelaksanaan Barang Milik Negara (BMN): realisasi anggaran kegiatan sampai dengan 31 Maret 2024seberar Rp11.622.000,00 (15,50%) dan realisasi fisik sekitar 20%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

1) Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan meliputi urusan tata kelola surat menyurat, kearsipan, pelayanan agenda rapat dinas, pelayanan komunikasi oleh operator, tata kelola perawatan kebersihan gedung dan lingkungan, serta pengendalian keamanan kantor;
2) Terlaksananya pelayanan perlengkapan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana/aset kantor, SK Tim Inventarisasi BMN Tahun 2024, data dukung surat keterangan transaksi berupa surat keterangan penghentian dari penggunaannya atas kendaraan R3 kondisi RB, PSP BMN, tindak lanjut usulan penghapusan atas kendaraan R3 kondisi RB, tindak lanjut CHR LK Tahun 2023.

ii) Layanan Umum

a. Manajemen Tata Usaha dan Kelembagaan Internal:realisasi anggaran kegiatan sampai dengan 31 Maret 2024 Rp20.096.000,00(30,32%) dan realisasi fisik sekitar 52,35%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:
   a) Pelaksanaan Surveilan tahap ISO 17043:2010 oleh Asesor dari KAN dilaksanakan tanggal 4-6 Maret 2024 di laksanakan di Bogor dan laboratorium mutu beras Karawang
   b) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional Lingkup BSIP, yang dilaksanakan di Ruang Rapat lantai 3 kantor pusat BSIP Jakarta pada tanggal 4 Maret 2024
   c) Rapim B Diperluas Lingkup BSIP, yang dilaksanakan di Aula Lantai 3 kantor pusat BSIP Jakarta pada tanggal 4 Maret 2024
   d) Pengawalan Kegiatan Tahun 2024/Pendampingan SPI oleh Inspektorat 4 Itjen Kementan pada tanggal 14-20 Maret 2024
   e) Koordinasi penilaian ZI WBK/WBBM lingkup BSIP, yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 26 Maret 2024

b. Layanan Informasi Publik: realisasi anggaran kegiatan sampai dengan 31 Maret 2024 Rp10.571.000,00(21,14%) dan realisasi fisik sekitar 35%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:
   1) Daftar Informasi Publik 2024 sudah disahkan oleh Kepala Balai Besar
   2) Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan tahun 2024 sudah dikirimkan ke PPID Utama dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada tanggal 5 Maret 2024
   3) Studi Banding PPID ke Balai Embrio Ternak Cipelang sudah dilaksanakan pada 7 Maret 2024
   4) Penyusunan laporan bulanan PPID

c. Pengelolaan Manajemen Kepegawaian (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian): realisasi anggaran kegiatan sampai dengan 31 Maret 2024 Rp10.439.000,00 (10,04%) dan realisasi fisik sekitar 25%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:
   1) Usulan Kenaikan Pangkat TMT Februari 2024 sebanyak 4 orang
   2) Usulan proses pensiun 2024 yang akan diproses sebanyak 4 orang
   3) Telah dilaksanakan Rekonsiliasi pemangku jabatan TMT Februari 2024
   4) Rapat koordinasi penyusunan SKP baru
   5) Rapat penyusunan MPH
   6) Pertemuan Sosialisasi Honorer BBPSI Pascapanen Pertanian sebanyak 50 orang

d. Layanan Pengelolaan PNBP (Pengelolaan dan Pengembangan Laboratorium): realisasi anggaran kegiatan sampai dengan 31 Maret 2024 dan realisasi fisik masih nol dikarenan masih diblokir, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:
   1) Penerbitan 141 Lembar Hasil Pengujian (LHU) Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian yang terdiri dari 80 Lembar Hasil Pengujian (LHU) yang diterbitkan di laboratorium pengujian Bogor dan 61 Lembar Hasil Pengujian (LHU) yang diterbitkan di laboratorium pengujian Karawang;
   2) Tindak Lanjut Surveilan ke-2 Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian (SNI ISO/IEC 17025:2017)

      Surveilan ke-2 Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian (SNI ISO/IEC 17025:2017) telah dilaksanakan pada tanggal 26-27 Februari 2024. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, dilakukan perbaikan terhadap 24

temuan ketidaksesuaian kategori 2 dan 1 temuan observasi (aspek teknis). Pembagian temuan terdiri dari 4 aspek manajemen dan 21 aspek teknis (10 Bogor, 11 di Karawang). Perbaikan temuan sudah disampaikan kepada tim asesor yang terdiri dari Tri Pratiwi (Asesor Kepala/ Asesor Teknis Mikrobiologi), Kikin Hamzah Mutaqin (Asesor Anggota/ Asesor Teknis Fisik), dan Herawati (Asesor Anggota/ Asesor Teknis Kimia) untuk direview sebelum diupload ke KANMIS.

Gambar 11.Tindak Lanjut Surveilan ke-2

3) Re-akreditasi Laboratorium PUP BBPSI Pascapanen Pertanian (SNI ISO/IEC 17043:2023)

   Re-akreditasi Laboratorium PUP BBPSI Pascapanen Pertanian (SNI ISO/IEC 17043:2023) dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 5-6 Maret 2024 bertempat di Aula Rapat Lantai 2 BBPSI Pascapanen Pertanian-Bogor (5 Maret 2024) dan Aula Inlit Karawang (6 Maret 2024). Asesor yang akan menilai ada dua, yaitu Herlin Rosdiana (Asesor Kepala/QMS) dan Amiyarsi Mustika Yukti (Asesor anggota/ Asesor PUP lingkup Pertanian).Penyusunan naskah Kerjasama dengan Laboratorium Balai Pengujian Mutu Barang dengan ruang lingkup pengujian residu pestisida dan logam berat;

Gambar 12. Re-akreditasi Laboratorium PUP BBPSI Pascapanen Pertanian (SNI ISO/IEC 17043:2023)

4) Penyusunan naskah Kerjasama PT. Laborindo

   Telah dilakukan rapat koordinasi penyusunan naskah Kerjasama antara PT. Laborindo Sarana (Pihak Kesatu) dengan BBPSI Pascapanen pertanian (Pihak Kedua) tentang uji coba alat Perten Paddycheck 6800. Ruang lingkup kerjasama ini adalah uji coba alat Perten PaddyCheck 6800 menggunakan sampel gabah yang dilakukan di Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealia Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian.

5) Penerimaan Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

6) Penyusunan naskah Technical Cooperation Project (TCP) dengan Biotanah

   Telah dilakukan rapat koordinasi penyusunan naskah Technical Cooperation Project (TCP) antara BBPSI Pascapanen/ Kementerian Pertanian – Indonesia (Pihak Kesatu) dengan BioTanah/ Perancis (Pihak Kedua) tentang "The Establishment and Development of Sustainable Agriculture in Indonesia". Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, Ketua Kelompok Layanan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, Ketua Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian, Perwakilan dari BSIP Mektan, dan Direktur BioTanah.

Gambar 13. Penyusunan naskah Technical Cooperation Project (TCP) dengan Biotanah

iii) Layanan Perkantoran

a. Gaji dan Tunjangan: realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp1.656.235.947,00 (24,76%) dan realisasi fisik sekitar 37%, dengan perkembangan kegiatan berupa pembayaran gaji dan tunjangan bulan Februari s.d Maret 2024.
b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor: realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp1.620.332.956,00 (19,87%) dan realisasi fisik sekitar 28%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut
   1) Kebutuhan sehari-hari perkantoran sebesar Rp667.751.611,00 (7.25%) dipergunakan untuk:
      Pembelian ATK, bahan pendukung komputer, bahan kimia, konsumsi rapat, langganan surat kabar dan bahan pendukung lainnya, untuk memenuhi kebutuhan bulan Februari 2024 kegiatan fisik perkantoran di Bogor dan Laboratorium Mutu Beras Karawang.
   2) Langganan daya dan jasa sebesar Rp364.243.244,00 (25,11%) dipergunakan untukKegiatan pembayaran langganan daya dan jasa telah dilaksanakan yaitu untuk langganan Listrik PLN, langganan telepon, langganan air PDAM dan gas untuk bulan Februari 2024 yang mencakup kantor Bogor dan Laboratorium Karawang
   3) Pemeliharaan perkantoran sebesar Rp483.241.676,00 (15,87%) dipergunakan untuk:
      - Perbaikan perbaikan pagar Laboratorium Mutu Beras Karawang
      - Lanjutan Perbaikan Plafon Laboratorium Mutu Beras Karawang
      - Pengecatan Pagar Kantor Bogor
      - Persiapan Perbaikan Ruangan Pimpinan

- Perbaikan atap dan plafon Laboratorium Pengolahan
- Perawatan dan bahan bakar mesin potong rumput di kantor Bogor dan Laboratorium Karawang;
- Perawatan kendaraan roda 2, 3, 4 di kantor Bogor dan Laboratorium Karawang.
- Perawatan AC
- Perawatan instalasi litrik dan komputer

4) Pembayaran terkait operasional kantor sebesas Rp105.096.425,00 (33,39%) dipergunakan untuk:
   - Pembayaran honor pengemudi non PNS bulan Februari 2024
   - Pembayaran honor satuan pengaman kantor non PNS bulan Februari 2024
   - Pembayaran honor tenaga pramu bakti dan kebersihan non PNS bulan Februari 2024
   - Pembayaran honor Satuan Kerja Bulan Februari 2024
   - Pelaksanaan untuk pengadaan seragam dinas pegawai (Seragam Senin, Kamis)

4.2. Layanan Manajemen Kinerja Internal:

a. Penyusunan Rencana Program danAnggaran,realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp64.857.751,00 (16,42%) dan realisasi fisik sekitar 26,50%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:

1) Perencanaan Program dan Anggaranrealisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp19.883.500,00 (12,43%) dan realisasi fisik sekitar 25%, dengan perkembangan kegiatan sebagai berikut:
   - Pembahasan Usulan RO BSIP 2024-2025
   - Rapat Pimpinan lingkup BSIP
   - Koordinasi Persiapan Pembukaan Blokir Anggaran lingkup BSIP TA 2024
   - Evaluasi Project Digest ICare

Gambar 14. Evaluasi project digest icare

- Usulan Anggaran Darurat Pangan
- Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
- Persiapan E-Proposal Termin I TA 2025
- Koordinasi Perbenihan dan PNBP
- Koordinasi Sistem Pangan dan Pertanian Berkelanjutan

Gambar 15. Koordinasi sistem pangan berkelanjutan

- Restrukturisasi ICARE
- Tindaklanjut Hasil Reviu Revisi Informasi Kinerja (PNBP)
- Penyusunan Kebijakan Grand Design BSIP 2045

2) Koordinasi Institusional realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp44.974.251,00 (27,59%) dan realisasi fisik sekitar 16%, dengan perkembangan kegiatan koordinasi internal pelaksanaan kegiatan

4.3. Pelaksanaan Monev, SPI Manajemen Risiko Index, Reformasi Birokrasi

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp14.582.800,00 (19,44%) dan realisasi fisik sekitar 25%, dengan perkembangan kegiatan sebagi berikut: Pada bulan Maret 2024, BBPSI Pascapanen telah melakukan penyusunan laporan rutin yang merupakan tusi terkait evaluasi dan pelaporan yaitu (1) laporan perkembangan kegiatan Balai bulan Januari s.d Maret, (2) laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat bulan Januari s.d Maret, (3) laporan Pengelola

Gratifikasi bulan Januari s.d Maret, (4) laporan pengelolaan penanganan benturan kepentingan bulan Januari s.d Maret, (5)Tersusun laporan bulanan kegiatan BBPSI Pascapanen Bulan Januari s.d Maret, (6) laporan Matrik realisasi KRO-RO kegiatan BBSI Pascapanen bulan Januari s.d Maret, (7) laporan SPI bulan Januari s.d Maret, (8) update data aplikasi e-monev bulan Januari s.d Maret.

4.4. Evaluasi Penerapan Dokumen SNI 17043:2023

Pelaksanaan evaluasi penerapan dokumen SNI 17043:2023 pada tanggal 5 Maret 2024 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) terkait Penyelenggaraan Uji Profisiensi. LPK BBPSI Pascapanen pertanian akan melakukan proses reakreditasi, membantu laboratorium penguji menilai kinerjanya juga untuk menilai kinerja alat dan personil dalam menganalasis parameter yang diujikan, proses pemeriksaan dokumen mutu dan witness persiapan sampel uji profisiensi untuk parameter amilosa

Gambar 16. Evaluasi penerapan dokumen SNI 17043:2023

4.5. Pengawalan Kegiatan Tahun 2024 oleh Inpsektorat Jenderal Kementan

Pengawalan dilakukan dari tanggal 14 s.d 21 Maret 2024, bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan penerapan manajemen risiko pada UK/UPT serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk Maretngkatkan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko dimasa mendatang. Hasil pengawalan selanjutnya digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas dalam penerapan manajemen risiko dan meminimalisasi potensi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi, sehingga manajemen harus memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan dengan tepat,

optimal, efektif, efisien, sistematis, terstruktur, komprehensif dan terintegritas. SPI kuncinya ada di Risk Analysis, selama ini jika salah menganalisis maka akan salah pengendaliannya. Pengawalan ini di fokuskan pada PK BBPSI Pascapanen, yaitu PK1 (RSNI), PK2 (ZI), dan PK3 (NKA).

Gambar 17. Pengawalan Kegiatan Tahun 2024 oleh Inpsektorat Jenderal Kementan

4.6. Rapat Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegritasi BSIP TA. 2024 dan Penyusunan Manajemen Risiko Indek

Rapat persiapan penilaian mandiri maturitas SPIP dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 22 Maret 2024 oleh BSIP yang dihadiri oleh TIM SPIP UK/UPT lingkup BSIP, dengan narasumber dari Biro keuangan dan BMN, Setjen Kementan dan dari pengawasan bidang pangan, pengelolaan energi dan sumber daya alam BPKP. Tujuannya Memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Meningkatan kompetensi Tim Penilaian Mandiri dalam melakukan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, diantaranya penyusunan Area of Improvement (AoI) dan rekomendasi atas penilaian pada setiap komponen, Meninjau kembali kesesuaian penetapan indikator dan target kinerja pada dokumen perencanaan unit kerja Eselon I.

Gambar 18. Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

4.7. Rapat Persiapan Penilaian Mandiri Pembangunan ZI dan survey SPAK dan SPAP BBPSI Pascapanen Pertanian

Rapat persiapan penilaian Mandiri ZI dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024 dan dihadiri oleh Tim Zona Integritas guna mengecek kesiapan dokumen datau data dukung yang diperlukan pada saat penilaian oleh BSIP.

4.8. Laporan Aplikasi Monev Online

Terdapat 4 aplikasi monev online yang dilaporkan setiap bulan dari setiap satker di BSIP. Sampai dengan akhir Maret 2024 berikut perkembangan laporan aplikasi monev online untuk kegiatan di BBPSI Pascapanen Pertanian:

4.8.1 Aplikasi SMART-DJA

sampai dengan bulan Maret 2024 adalah 0 dengan rincian: penyerapan sebesar 0; konsistensi 0; CRO 0; efisiensi 0; dan nilai efisiensi 0 belum sinkronnya penarikan data dari aplikasi SAKTI sehingga capaian NK nya masih nol hal ini dikarenakan aplikasi Smart Kemenkeu masih dalam pengembangan atau pembaharuan sistem dan belum dilakukannya pengentrian data pada aplikasi SAKTI.

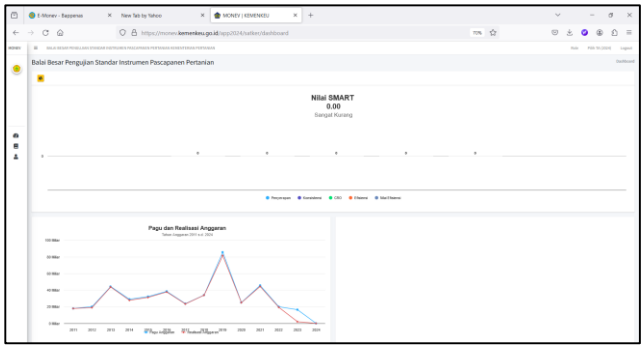

Gambar 19. Dashboard aplikasi SMART-DJA

Berdasarkan aplikasi SMART-DJA, komposisi alokasi dan realisasi anggaran di BBPSI Pascapanen Pertanian sampai dengan akhir Maret 2024, persentase realisasi anggaran terhadap alokasinya per jenis belanja sebagai berikut: belanja pegawai (00%), belanja barang (00%), dan belanja modal (00%), hal ini dikarenakan aplikasi Smart Kemenkeu masih dalam pengembangan atau pembaharuan sistem dan belum dilakukannya pengentrian data pada aplikasi SAKTI.

Pada aplikasi SMART-DJA juga terlihat komposisi anggaran di BBPSI Pascapanen Pertanian, dari total anggaran, sekitar 37,1% untuk belanja pegawai dan 62,9% untuk belanja barang, sedangkan belanja modal 0%.

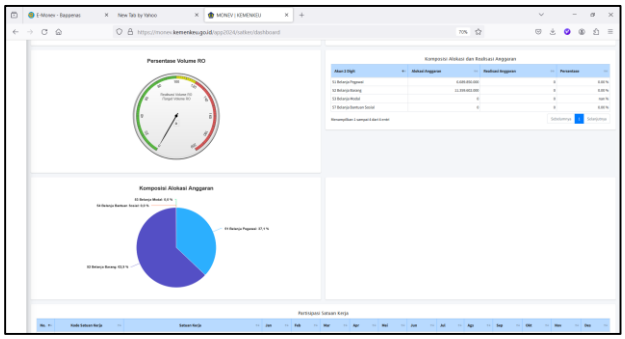

Gambar 20. Tabel komposisi alokasi dan realisasi anggaran pada aplikasi SMART-DJA

4.8.2 Aplikasi e-monev Bappenas

BBPSI Pascapanen telah melakukan update realisasi keuangan dan fisik serta keterangan perkembangan kegiatan pada aplikasi e-monev Bappenas sampai bulan Maret 2024. Sebaran kategori pelaksanaan yaitu, (a) Belum dilaporkan 0 %, (b) Persiapan 20%, (c) Perencanaan 0%, (d) pelaksanaan 80%, (e) Selesai 0%.

Pelaksanaan dan serapan anggaran sampai bulan Maret 2024 sebesar Rp3.447.830.454,- (19,69%) dari pagu anggaran Rp17.510.452.000,- dengan rincia serapan anggaran:

a) Pelaporan komponen Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan rincian realisasi keuangan sebesar RP31.276.000 (2,6%);
b) Pelaporan komponen Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian dengan rincian keuangan sebesar Rp3.416.554.454 (20,9%)
c) Presentase kemanfaatan sebesar 20%

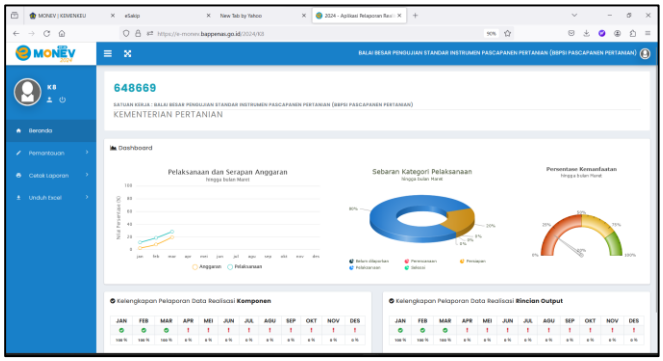

Gambar 22. Dashboard aplikasi e-monev Bappenas

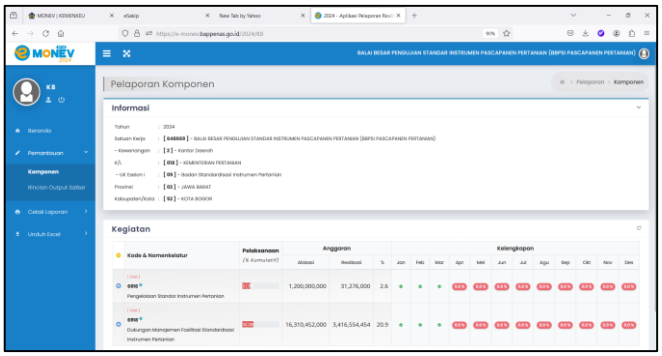

Gambar 23. Tabel realisasi anggaran pada aplikasi emonev Bappenas

4.8.3 Aplikasi e-monev BSIP

BBPSI Pascapanen telah melakukan update realisasi keuangan dan fisik, serta perkembangan kegiatan hasil kegiatan sampai bulan Maret 2024 dengan rincian realisasi SPM sebesar RP4.052.983.758,- (23,15%), realisasi SP2D sebesar RP3.494.147.127,- (19,95%), dan realisasi kuitansi sebesar Rp4.824.655.801,- (27,55%) dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 23,64% (Gambar 4). Adapun realisasi berdasarkan perjenis belanja:

1) Belanja Pegawai realisasi SPM sebesar Rp2.084.070.801,- (31,15%) dan realisasi SP2D sebesar Rp1.701.984.170,- (25,44%)
2) Belanja Barang realisasi SPM sebesar Rp1.968.912.957,- (18,20%) dan realisasi SP2D sebesar Rp1.792.162.957,- (16,56%).

   Belanja Modal realisasi SPM sebesar Rp00,- (0,0%) dan realisasi SP2D sebesar Rp00,- (0,0%).

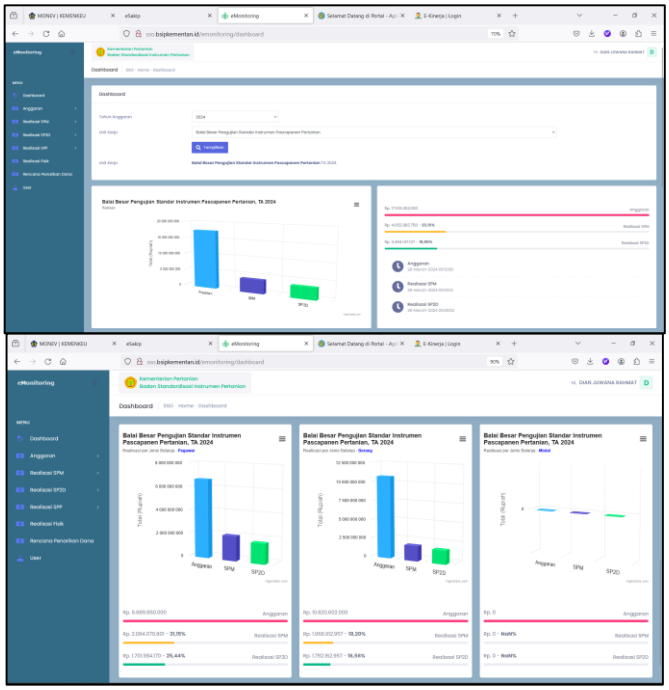

Gambar 24. Dashboard aplikasi e-monev BSIP

4.8.4 Aplikasi e-sakip Kementan

Sampai dengan akhir Maret 2024, aplikasi esakip Kementan belum dapat diisi, karena masih dalam proses pembaharuan/pengembangan. Dalam aplikasi ini akan melaporkan capaian kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian, yaitu PK level 2 (KaBB) dan level 3 (Kabag TU).

Data aplikasi e-SAKIP BBPSI Pascapanen yang bersumber dari dokumen PK terdapat 3 Sasaran Kinerja (SK) yaitu :

1) SK1-Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan Indikator Kinerja (IK) IK1-Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, realisasi/progres sampai bulan Maret 2024 masih NOL;
2) SK2-Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen {ertanian yang Efektif dan Efisien, dan Beorientasi pada Layanan Prima dengan IK2- Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian realisasi/progres sampai bulan Maret 2024 masih NOL;
3) SK3-Terkelolanya anggaran BSIP yang akuntabel dan berkualitas dengan IK3-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, realisasi/progres sampai bulan Maret 2024 masih NOL.

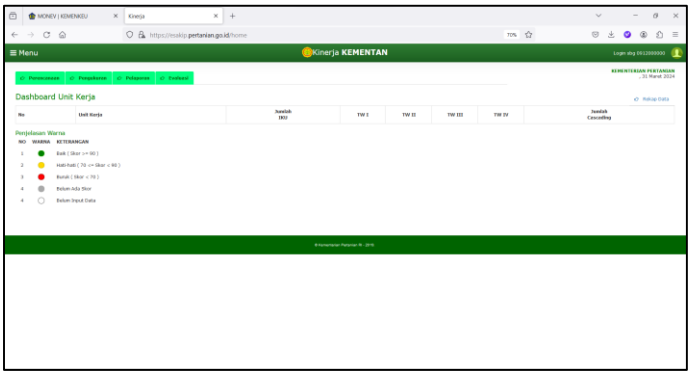

Gambar 25. Tampilan aplikasi e-monev BSIP

5. Manajemen Keuangan

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp7.817.000,00(12,21%) dan realisasi fisik sekitar 25%, dengan perkembangan kegiatan sebagi berikut:

- Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan: Telah diterbitkannya Perubahan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran TUP

6. Laporan Keuangan

Balai Besar Pengujian Standarisasi Instrumen Pascapanen Pertanian Tanggal 30 Nopember 2023 memiliki pagu anggaran sebesar Rp17.549.452.000,00 Selama TA. 2024, sampai dengan akhir Februari 2024, DIPA BBPSI Pascapanen mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali. Revisi POK ke 1 pada tanggal 22 Desember 2022. Revisi kedua pada tanggal 23 Februari 2024, dengan pagu anggaran sebesar Rp17.549.452.000,00 . Revisi ketiga pada tanggal 10 Februari 2024, merupakan revisi POK, dengan pagu anggaran tetap. Revisi keempat pada tanggal 15 Februari 2024, realokasi anggaran dengan pagu anggaran menjadi Rp 17.510.452.000,00.

Belanja dalam rangka operasional kegiatan BBPSI Pascapanen dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya seluruh kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Komposisi pagu anggaran BBPSI Pascapanen Pertanian disajikan pada tabel 1. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai Rp6.689.850.000,00 (38,2%), belanja barang Rp10.247.896.000,00 (58,6%), belanja PNBP Rp572.706.000,00 (3,2%).Pada Tabel 1
disajikan Realisasi anggaran (SP2D) sampai dengan 31 Maret2024 yaitu sebesar Rp1.465.507.793,00 (8,37%), dengan realisasi per jenis belanja yaitu belanja pegawai. Rp808.265.342,00 (12,08%), belanja barang Rp657.242.451,00 (6,43%), dan belanja PNBP sebesar Rp,- (0%).Belanja PNBP masih belum dilaksanakan karena kondisi anggaran masih diblokir dan masih dalam pembahasan untuk pembukaan blokir tersebut.

Tabel 1. Realisasi anggaran TA. 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 berdasarkan jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasis/d31 Maret 2024	
		Rp	%
Belanja pegawai	6.689.850.000,00	1.656.235.947	25
Belanja barang	10.247.896.000,00	1.791.594.507	17,17
PNBP	572.706.000,00	-	-
Total	**17.510.452.000,00**	**3.447.830.454**	**19,69**

7. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen di BBPSI Pascapanen Pertanian diantaranya:

- Realisasi keuangan masih rendah dikarenakan beberapa kegiatan mengacu kepada pelaksanaan BSIP dan kegiatan baru berjalan setelah pembukaan blokir anggaran serta da beberapa kegiatan yang masih dalam penyelesaian pertanggungjawaban administrasi SPJ.
- Untuk kegiatan pemeliharaan kantor, pelaksanaan pengecatan gedung kantor terkendala cuaca dengan curah hujan tinggi.

  Adapun beberapa upaya pemecahan permasalahan diatas diantaranya:
- Mempercepat kegiatan secara internal, serta kegiatan dilaksanakan mengikuti agenda BSIP.
- Menunda proses pengecatan gedung kantor

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pada Perjanjian Kinerja TA.2024, BBPSI Pascapanen Pertanian telah menetapkan tiga sasaran yang akan dicapai beserta masing-masing indikator sasaran/kinerjanya. Untuk sasaran pertama "Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian", dengan indikator kinerja kegiatan berupa Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan, target tahun ini 4 Rancangan, sampai dengan akhir Februari 2024 telah diperoleh konsep rancangan awal untuk 4 target RSNI yang akan dibuat, namun rancangan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut.
2. Sasaran kedua, "Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima", dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 82 (Nilai). Sasaran ketiga, "Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas", dengan indikator kinerja kegiatan berupa Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, target tahun ini 85 (Nilai). Permasalahan utama dalam pencapaian target kegiatan adalah adanya blokir anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan agak terhambat. Ke depan diharapkan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai perencanaannya dan bisa mencapai targetnya. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan untuk diatasi, dan langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut dapat dijadikan langkah antisipatif dalam mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan kegiatan ke depannya.
3. Total Anggaran DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.510.452.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Manajemen Kinerja Internal. Sumber dana berasal dari Rupiah Murni Rp17.533.846.000,00 dan PNBP sebesar

Rp572.706.000,00. Komposisi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jenis belanja adalah (1) Belanja Pegawai sebesar Rp6.689.850,00(2) Belanja Barang Operasional Rp8.155.000.000,00 dan (3) Belanja Barang non Operasional sebesar Rp2.665.602.000,00. Realisasi anggara berdasarkan pagu efektif per 31 Maret 2024 sebesar Rp3.447.830.454,00 (17,17%), merupakan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.656.235.947,00 (25%) dan Belanja Barang Rp 1.791.594.507,00 (19,69%)

5.2. Saran

Dengan disusunnya Laporan Bulanan ini, diharapkan adanya perbaikan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan kinerja BBPSI Pascapanen Pertanian pada tahun 2024 dan periode berikutnya. Dengan demikian, Laporan Bulanan ini benar-benar dapat dijadikan rujukan sekaligus pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja BBPSI Pascapanen.